

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2021

Jln. R.A. Kartini No. 18/23

MAKASSAR - Sulawesi Selatan 90111

Telp. 04113624058 Fax. 04113634667

e-mail : info@pn-makassar.go.id



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2021

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jln. R.A. Kartini No. 18/23

Telp. 04113624058 Fax. 04113634667

MAKASSAR - Sulawesi Selatan 90111

e-mail : info@pn-makassar.go.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Makassar adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Makassar mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Makassar. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

MAKASSAR, 30 Juni 2021

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris



IREAN TAHIR ARNAN, S.Pi, SH
NIP. 198110262006041003

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel dan Lampiran	1
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan.....	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	14
II. Neraca.....	16
III. Laporan Operasional.....	18
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	19
V. Catatan atas Laporan Keuangan	21
A. Penjelasan Umum	21
A.1. Dasar Hukum	21
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Makassar.....	22
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	23
A.4. Basis Akuntansi.....	24
A.5. Dasar Pengukuran.....	24
A.6. Kebijakan Akuntansi	24
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	32
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah.....	32
B.2. Belanja.....	33
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	36
C.1. Aset Lancar	36
C.2. Aset Tetap.....	38
C.5. Kewajiban Jangka Pendek.....	43
C.6. Ekuitas	44
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	44
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	44
D.2. Beban Pegawai	45

D.3.	Beban Persediaan	46
D.4.	Beban Barang dan Jasa	46
D.5.	Beban Pemeliharaan.....	47
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	48
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	48
D.8.	Beban Bantuan Sosial	49
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	49
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	50
D.11.	Beban Lain-lain	51
D.12.	Kegiatan Non Operasional	51
D.13.	Pos Luar Biasa	52
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	52
E.1.	Ekuitas Awal	52
E.2.	Surplus (defisit) LO	52
E.3. 1.	Penyesuaian Nilai Aset	52
E.3. 2	Koreksi Nilai Persediaan	52
E.3. 3	Selisih Revaluasi Aset Tetap	53
E.3. 4	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	53
E.3. 5	Koreksi Lain-lain	53
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	54
E.4. 1	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	54
E.4. 2	Transfer Masuk/Transfer Keluar	55
E.5.	Ekuitas Akhir	55
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	55
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	55
	Laporan-laporan Pendukung.....	57
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	58

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 dan 2020	10
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2021 dan 2020	11
Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2021.....	32
Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2021 dan 2020	32
Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2021	33
Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2021	33
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020	34
Tabel 10 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020.....	34
Tabel 11 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020.....	35
Tabel 12 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020.....	36
Tabel 13 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2021 dan 2020.....	37
Tabel 14 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	37
Tabel 17 Rincian Belanja Dibayar di Muka	37
Tabel 24 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2021 dan 31 Desember 2020	38
Tabel 25 Rincian Aset Tetap	39
Tabel 26 Rincian Saldo Tanah	39
Tabel 27 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	42
Tabel 1 Rincian Aset tak Berwujud.....	43
Tabel 2. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2021 dan 2020	44
Tabel 3 Rincian nilai perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2021.....	59
Tabel 4 Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa	61
Tabel 5 Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual	62

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Negeri Makassar

Jln. R.A. Kartini No. 18/23 MAKASSAR - Sulawesi Selatan 90111

Telp. 04113624058 Fax. 04113634667 e-mail : info@pn-makassar.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Makassar yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Makassar telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

MAKASSAR, 30 Juni 2021

Kuasa Pengguna Anggaran,

Sekretaris,



Infantahir Arnan, S.Pi., SH.

NIP. 198110262006041003

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2021 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2021 s.d. 30 Juni 2021 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 4.692.750 atau mencapai 23,08 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 20.333.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2021 adalah sebesar Rp. 12.509.557.678 atau mencapai 52,05 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 24.035.878.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 dan 2020 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Anggaran	TA 2021		TA 2020 Realisasi
		Realisasi	% real. Thd anggaran	
Pendapatan Negara	20.333.000	4.692.750	23,08	12.170.037
Belanja Negara	24.035.878.000	12.509.557.678	52,05	10.260.562.307

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2021 dan 2020.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 300.039.545.129, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 132.806.899; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 299.906.738.230; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp. 0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 60.000.000 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 60.000.000 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp. 0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp. 299.979.545.129.

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2021 dan 31 Desember TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	2021	2020	Rp	%
Aset				
Aset Lancar	132.806.899	63.315.579	69.491.320	109,75
Aset Tetap	299.906.738.230	301.232.776.695	(1.326.038.465)	(0,44)
Aset Lainnya	0	0	0	(50,00)
Jumlah Aset	300.039.545.129	301.296.092.274	(1.256.547.145)	(0,41)
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	60.000.000	32.366.833	27.633.167	85,37
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0,00
Jumlah Kewajiban	60.000.000	32.366.833	27.633.167	85,37
Ekuitas Dana				
Ekuitas	299.979.545.129	301.263.725.441	(1.284.180.312)	(0,42)
Jumlah Ekuitas Dana	299.979.545.129	301.263.725.441	(1.284.180.312)	(0,42)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	300.039.545.129	301.296.092.274	(1.256.547.145)	(0,41)

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp. 4.692.750,-, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 13.825.164.990, sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (13.820.472.240) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp. 0 dan surplus(defisit) sebesar Rp. 0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp. (13.820.472.240).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp. 301.263.725.441 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp. (13.820.472.240) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 12.536.291.928 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2021 adalah senilai Rp. 299.979.545.129.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2021, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2021, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021 DAN 2020
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2021			TA 2020
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	20.333.000	4.692.750	23,08	12.170.037
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		20.333.000	4.692.750	23,08	12.170.037
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	20.645.222.000	11.175.877.654	54,13	8.475.592.940
2.	Belanja Barang	B.2.2.	3.325.656.000	1.333.680.024	40,10	1.326.746.367
3.	Belanja Modal	B.2.3.	65.000.000	0	0,00	458.223.000
	Jumlah Belanja Negara		24.035.878.000	12.509.557.678	52,05	10.260.562.307

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
NERACA
PER 30 JUNI 2021 DAN 2020
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2021	31 Desember 2020
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1 1.	60.000.000	0
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1 2.	0	0
Persediaan	C.1 3.	72.806.899	63.315.579
Persediaan yang Belum Diregister	C.1. 3.	0	0
Jumlah Aset Lancar		132.806.899	63.315.579
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	248.800.769.000	248.800.769.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	9.089.552.895	9.058.125.895
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	58.643.557.800	58.643.557.800
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	162.196.469	162.196.469
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	(16.789.337.934)	(15.431.872.469)
Jumlah Aset Tetap		299.906.738.230	301.232.776.695
Aset tak Berwujud	C.4. 1.	5.000.000	5.000.000
Aset Lain-Lain	C.4. 2.	0	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4. 3.	(5.000.000)	(5.000.000)
Jumlah Aset		300.039.545.129	301.232.776.695
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Uang Muka dari KPPN	C.5. 1.	60.000.000	0
Utang Kepada Pihak Ketiga		0	32.366.833
Jumlah Kewajiban		60.000.000	32.366.833
EKUITAS			
Ekuitas	C.6	299.979.545.129	301.263.725.441
Jumlah Ekuitas Dana		299.979.545.129	301.263.725.441
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		300.039.545.129	301.296.092.274

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 JUNI 2021 DAN 2020
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2021	30 Juni 2020
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	4.692.750	7.819.950
Jumlah Pendapatan		4.692.750	7.819.950
7Beban			
Beban Pegawai	D.2	11.175.877.654	8.473.604.676
Beban Persediaan	D.3	26.874.230	75.743.983
Beban Barang dan Jasa	D.4	971.623.666	962.180.692
Beban Pemeliharaan	D.5	275.672.675	229.051.643
Beban Perjalanan Dinas	D.6	17.651.300	11.213.600
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D.8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	1.357.465.465	1.389.420.337
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	0	0
Beban Lain-lain	D.11	0	0
Jumlah Beban		13.825.164.990	11.141.214.931
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(13.820.472.240)	(11.133.394.981)
Kegiatan Non Operasional			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	D.12	0	0
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	20.234.912
Beban dari Kegiatan Non Operasional lainnya		0	1.025.400
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	20.234.912
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		0	0
Pos Luar Biasa	D. 13	0	0
Beban Luar Biasa		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(13.820.472.240)	(11.113.160.069)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 JUNI 2021 DAN 2020
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2021	30 Juni 2020
Ekuitas Awal	E. 1	301.263.725.441	303.018.084.049
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(13.820.472.240)	(11.113.160.069)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar			
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas			
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	12.536.291.928	10.248.392.270
Ekuitas Akhir		299.979.545.129	302.153.316.250

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. *CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan

Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Makassar

Visi Pengadilan Negeri Makassar adalah "Mendukung Terwujudnya Pengadilan Negeri Makassar yang Agung", yang bertujuan agar Pengadilan Negeri Makassar sebagai salah satu Badan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Misi Pengadilan Negeri Makassar adalah :

- 1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat,
- 2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain,

3. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat,
4. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat,
5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati,
6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Makassar melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektifitas pengelolaan penerimaan/pendaftaran dan pemeriksaan perkara,
2. Meningkatkan penyelesaian permohonan,
3. Meningkatkan penyelesaian perkara,
4. Meningkatkan akseptabilitas pengelolaan penyelesaian perkara,
5. Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara,
6. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap teradilan (aces to justice),
7. Meningkatkan kualitas pengawasan.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Makassar adalah sebagai berikut :

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja

terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang

menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat

tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(4.) Kewajiban Jangka Panjang

(5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung..

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah : Rp.
4.692.750

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp. 4.692.750 atau mencapai 23,08 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 20.333.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Makassar adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 3 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	20.333.000	4.692.750	23,07
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0,00
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
Total Pendapatan		20.333.000	4.692.750	23,07

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp. 7.477.287 atau (61,44) persen dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan karena :

1. Menurunnya aktivitas jasa sewa rumah dinas;
2. Menurunnya pendapatan jasa yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Kantor Pengadilan Negeri Makassar;

Perbandingan realisasi PNBP TA 2021 dan 2020 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2021	2020	Perubahan Rp	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4.692.750	7.819.950	3.127.200	39,99
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0	0
3.	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	0	0	0	0
4.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4.350.087	4.350.000	100
Total Pendapatan		4.692.750	12.170.037	(7.477.287)	(61,44)

B.2. Belanja

*Realisasi
Belanja Negara :
Rp
12.509.557.678*

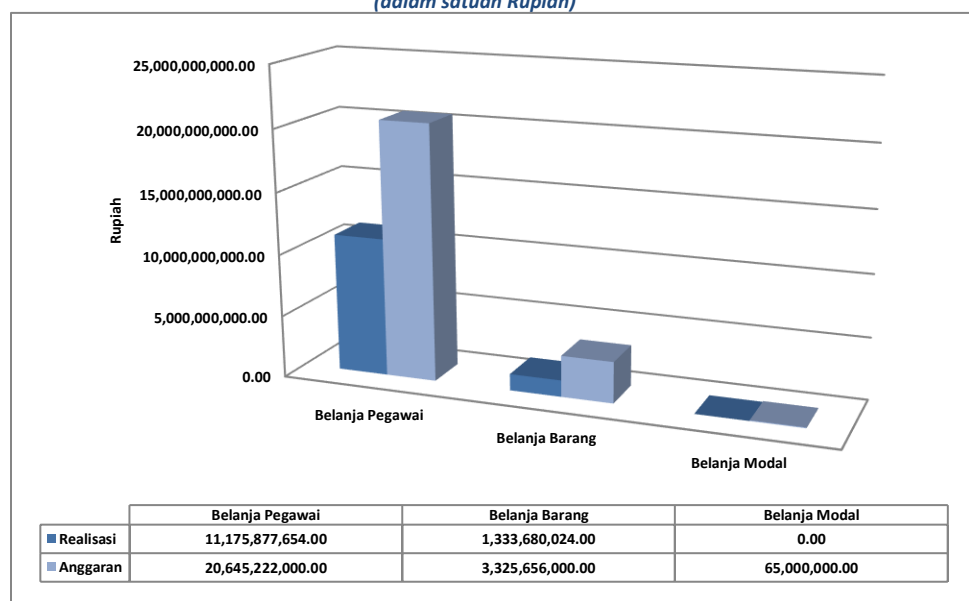
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Makassar per 30 Juni TA 2021 adalah sebesar Rp. 12.509.557.678 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 52,05% dari anggaran senilai Rp. 24.035.878.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2021		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	24.035.878.000	11.175.877.827	54,13
Belanja Barang	3.325.656.000	1.333.680.024	40,10
Belanja Modal	65.000.000	0	0,00
Total Belanja Bruto	24.035.878.000		
Pengembalian Belanja		(173)	0
Total Belanja Netto	24.035.878.000	12.509.557.678	52,05

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2021 & 2020

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.248.995.371 atau

sebesar 21,91 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena realisasi belanja pegawai. Perbandingan realisasi belanja TA 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	11.175.877.654	8.475.592.940	2.700.287.714	31,85
Belanja Barang	1.333.680.024	1.326.746.367	6.933.657	0,52
Belanja Modal	0	458.223.000	(458.223.000)	0
Total Belanja	12.509.557.678	10.975.606.661	2.248.995.371	21,91

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi
Belanja Pegawai
:
Rp
11.175.877.654

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Makassar per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020 adalah sebesar Rp. 11.175.877.654 dan Rp. 8.475.592.940.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 31,83 persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2020. Hal ini disebabkan Meningkatnya jumlah pembayaran gaji utamanya di belanja gaji pokok dan tunjangan fungsional hakim.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 8 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	3.594.703.460	2.805.331.260	789.372.200	28,13
Beban Pembulatan Gaji PNS	49.799	40.708	9.091	22,33
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	234.889.266	182.297.620	52.591.646	28,84
Beban Tunj. Anak PNS	83.981.736	62.052.078	21.929.658	35,34
Beban Tunj. Struktural PNS	51.175.000	18.200.000	32.975.000	64,43
Beban Tunj. Fungsional PNS	4.049.740.000	2.814.220.000	1.235.520.000	43,90
Beban Tunj. PPh PNS	709.710.546	395.776.000	313.934.546	79,32
Beban Tunj. Beras PNS	190.537.020	125.503.860	65.033.160	51,81
Beban Uang Makan PNS	407.321.000	386.198.150	21.122.850	5,46

Beban Tunjangan Umum	18.120.000	13.185.000	4.935.000	37,42
PNS				
Beban Tunjangan	183.600.000	159.300.000	24.300.000	15,25
Kemahalan Hakim				
Beban Tunjangan Hakim Ad Hoc	1.652.050.000	1.511.500.000	140.550.000	9,29
Total Belanja Brutto				
	11.175.877.827	8.476.324.927	2.699.552.900	31,84
Pengembalian Belanja				
	(173)	(731.987)	(731.814)	99,97
Total Belanja Netto				
	11.175.877.654	8.475.592.940	2.700.287.714	31,85

B.2.2. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja Barang :
Rp1.333.680.024*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Makassar per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020 adalah sebesar Rp. 1.333.680.024 dan Rp. 1.326.746.367.

Realisasi Belanja Barang TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp 6.933.657 atau (0,52) persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain Optimalnya penyerapan belanja barang berupa belanja pemeliharaan.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021 Realisasi	TA 2020 Realisasi	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Barang Operasional	1.331.680.024	1.326.746.367	4.933.657	0,37
Belanja Barang Non Operasional	2.000.000	0	(7.150.000)	(100)
Total Belanja Brutto	1.326.746.367	1.326.746.367	330.419.047	33,40
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	1.326.746.367	989.177.320	330.419.047	33,40

B.2.3. Belanja Modal

*Realisasi
Belanja Modal
:Rp0*

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Negeri Makassar per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 458.223.000. Realisasi Belanja Modal mengalami penurunan karena anggaran belanja modal tahun 2021 lebih kecil dibanding anggaran belanja modal 2020.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 10 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	0	0	0	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	458.223.000	458.223.000	100
Belanja Modal Lainnya	0	0	0	0
Total Belanja Brutto	0	458.223.000	458.223.000	100
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	0	458.223.000	458.223.000	100

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

*Aset Lancar :
Rp132.806.899*

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 132.806.899 dan Rp. 63.315.579.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Negeri Makassar per 30 Juni 2021 dan 2020 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 11 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Juni TA 2021	Desember TA 2020
Kas di Bendahara Pengeluaran	60.000.000	0
Belanja Dibayar di Muka	0	0
Persediaan	72.806.899	63.315.579
Persediaan belum deregister	0	0
Total Aset Lancar	132.806.899	63.315.579

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran: Rp60.000.000

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 60.000.000 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan. Kas di Bendahara Pengeluaran saat ini belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca karena masih dikelola oleh Bendahara.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 12 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2021	31 Desember TA 2020
1.	Uang Muka dari KPPN	60.000.000	0
Jumlah		60.000.000	0

C.1.2. Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di Muka: Rp0

Belanja Dibayar di Muka per 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

Tabel 13 Rincian Belanja Dibayar di Muka
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2021	30 Desember TA 2020
1	Belanja dibayar dimuka	0	0
Jumlah		0	0

C.1.3. Persediaan

*Persediaan :
Rp72.806.899*

Persediaan per 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 72.806.899 dan Rp. 63.315.579. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 14 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2021 dan 31 Desember 2020

No.	Uraian	30 Juni 2021	31 Desember 2020
1	Barang Konsumsi	66.937.749	58.504.579
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	5.869.150	4.811.000
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
	Total	72.806.899	63.315.579

C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap :
Rp299.906.738.
230*

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2021 dan 2020 tersaji sebesar Rp. 299.906.738.230 dan Rp. 301.232.776.695. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 15 Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2021	TA 2020	Perubahan
1	Tanah	248.800.769.000	248.800.769.000	0
2	Peralatan dan Mesin	9.089.552.895	9.058.125.895	31.427.000
3	Gedung dan Bangunan	58.643.557.800	58.643.557.800	0
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	162.196.469	162.196.469	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	Jumlah	316.696.076.164	316.664.649,434	31.427.000
	Akumulasi Penyusutan	(16.789.337.934)	(15.431.872.469)	(1.357.465.465)
	Nilai Buku Aset Tetap	299.906.738.230	301.232.776.965	(1.326.038.465)

C.2.1. Tanah

Tanah :
Rp248.800.769.000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 248.800.769.000 dan Rp. 248.800.769.000

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 16 Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1.	1	600	SHP No. 78/1977	Pemerintah RI Cq. MARI	Rumah Dinas	8.021.155.000
2.	2	397	SHP No. 41/1992	Dep. Kehakiman RI berkedudukan di Jakarta	Rumah Dinas	1.109.642.000
3.	3	900	SHM No. 544/1980	H. Kalamang	Rumah Dinas	13.718.058.000
4.	4	200	SHM No. 674/1982	Hamzy	Rumah Dinas	329.361.000
5.	5	200	SHM No. 675/1982	Hamzy	Rumah Dinas	329.361.000
6.	6	1.440	SHP No. 60/1992	Pemerintah RI Cq. MARI	Rumah Dinas	2.582.331.000
7.	7	560	SHP. No. 160	Pemerintah RI Cq. MARI	Rumah Dinas	1.892.338.000
8.	8	1.050	SHP No. 20002/1999	Pemerintah RI Cq. MARI	Rumah Dinas	3.618.709.000
9.	9	306	SHP No. 387/1994	Pemerintah RI Cq. MARI	Rumah Dinas	3.981.641.000
10.	10	7.187	SHP No. 59/1992	Dep. Kehakiman RI	Kantor	208.105.791.000
11.	11	1.661	SHP No. 20007/2012	Pemerintah RI Cq. MARI	Kantor	5.112.382.000
Jumlah						248.800.769.000

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin :
Rp9.089.552.895*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 9.089.552.895 dan Rp. 9.058.125.895. Terdapat penambahan nilai dari peralatan dan mesin yang merupakan hibah dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero).

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2020	9.058.125.895
Mutasi Tambah	0
Hibah	31.427.000
Mutasi Kurang	0
	0
Saldo per 30 Juni 2021	9.089.552.895
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2021	(8.389.802.202)
Nilai Buku 30 Juni 2021	699.750.693

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan :
Rp58.643.557.800*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 58.643.557.800 dan Rp. 58.643.557.800.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2020	58.643.557.800
Mutasi Tambah	0
Transfer Masuk	0
Mutasi Kurang	0
	0
Saldo per 30 Juni 2021	58.643.557.800
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2021	(8.398.035.732)
Nilai Buku 30 Juni 2021	50.245.522.068

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2020	0
Mutasi Tambah	0
	0
Mutasi Kurang	0
	0
Saldo per 30 Juni 2021	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2021	0
Nilai Buku 30 Juni 2021	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya:
Rp162.196.469*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 162.196.469 dan Rp. 162.196.469.

Realisasi belanja dalam rangka perolehan Aset Tetap Lainnya pada semester I Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 0,-. Tidak ada mutasi tambah ataupun mutasi keluar pada nilai perolehan aset yang dapat menyebabkan perubahan nilai aset pada Neraca Pengadilan Negeri Makassar.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2020	162.196.469
Mutasi Tambah	0
	0
Mutasi Kurang	0
	0
Saldo per 30 Juni 2021	162.196.469
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2021	1.500.000
Nilai Buku 30 Juni 2021	160.696.469

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan : Rp0

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset tetap : Rp. [16.789.337.934]

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp. (16.789.337.934) dan Rp. (15.431.872.469).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2021 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Tabel 17 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	9.089.552.895	(8.389.82.202)	699.750.693
2	Gedung dan Bangunan	58.643.557.800	(8.398.035.732)	50.245.522.068
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	162.196.469	(1.500.000)	160.696.469
	Jumlah	67.895.307.069	(16.789.337.934)	51.105.969.230

C.4.1. Aset tak berwujud

Aset tak Berwujud : Rp 5.000.000

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 5.000.000 dan Rp. 5.000.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang

dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Adapun rincian ATB per 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 18 Rincian Aset tak Berwujud
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1.	Aset Tak Berwujud (anti virus)	5.000.000
	Jumlah Total	5.000.000

Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Negeri Makassar berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Tidak terdapat mutasi untuk aset tidak berwujud selama tahun 2021. Realisasi belanja dalam rangka perolehan Aset Tak Berwujud pada semester I Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 0,-.

C.4.2. Aset Lain-lain

*Aset Lain-lain :
Rp 0*

Saldo aset lain-lain per 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Negeri Makassar serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 30 Juni 2020	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2021	0

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek :
Rp60.000.000*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 60.000.000 dan Rp. 0. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan

Negeri Makassar per 30 Juni 2021 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 19. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020
Utang kepada Pihak Ketiga	0	0
Uang Muka dari KPPN	60.000.000	0
Jumlah	60.000.000	0

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka
dari KPPN:
Rp60.000.000*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp60.000.000 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

*Cadangan
Piutang:
Rp301.263.725.
441*

Ekuitas per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 301.263.725.441 dan Rp. 303.018.084.049. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 30 Juni 2021 terdapat kenaikan nilai Kewajiban sebesar Rp. 27.633.167 dari nilai per 31 Desember TA 2020. Jumlah nilai Kewajiban pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp. 60.000.000, sedangkan per 31 Desember TA 2020 tercatat sebesar Rp. 32.366.833.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan
PNbp :
Rp4.692.750*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah

sebesar Rp. 4.692.750 dan Rp. 7.819.950. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Tabel 36 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4.692.750	7.819.950	39,99
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0,00
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
Total Pendapatan		4.692.750	7.819.950	39,99

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai
:
Rp11.175.877.6
54

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp11.175.877.654 dan Rp8.473.604.676. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 37 Rincian Beban Pegawai per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	3.594.703.460	2.805.331.260	789.372.200	28,13
Beban Pembulatan Gaji PNS	49.799	40.708	9.091	22,33
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	234.889.266	182.297.620	52.591.646	28,84
Beban Tunj. Anak PNS	83.981.736	62.052.078	21.929.658	35,34
Beban Tunj. Struktural PNS	51.175.000	18.200.000	32.975.000	64,43
Beban Tunj. Fungsional PNS	4.049.740.000	2.814.220.000	1.235.520.000	43,90
Beban Tunj. PPh PNS	709.710.546	395.776.000	313.934.546	79,32
Beban Tunj. Beras PNS	190.537.020	125.503.860	65.033.160	51,81

Beban Uang Makan PNS		407.321.000	386.198.150	21.122.850	5,46
Beban Tunjangan Umum PNS		18.120.000	13.185.000	4.935.000	37,42
Beban Tunjangan Kemahalan Hakim		183.600.000	159.300.000	24.300.000	15,25
Beban Tunjangan Hakim Ad Hoc		1.652.050.000	1.511.500.000	140.550.000	9,29
Total Belanja Brutto		11.175.877.827	8.476.324.927	2.699.552.900	31,84
Pengembalian Belanja		(173)	(731.987)	(731.814)	99,97
Total Belanja Netto		11.175.877.654	8.475.592.940	2.700.287.714	31,85

D.3. Beban Persediaan

*Beban Persediaan :
Rp26.874.230*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 26.874.230 dan Rp. 75.743.983. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 38 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	26.874.230	75.743.983	(48.869.753)	(64,51)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	26.874.230	75.743.983	(48.869.753)	(64,51)

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan Jasa :
Rp971.623.666*

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 971.623.666 dan Rp. 962.180.692. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dan barang dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang

berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 39 Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	524.911.288	505.822.288	19.089.000	3,77
Beban Jasa Pos dan Giro	927.500	4.381.999	(3.454.499)	(78,83)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	16.600.000	20.750.000	(4.150.000)	(20,00)
Beban Barang Operasional Lainnya	66.946.400	13.035.700	53.910.700	413,56
Beban Langganan Listrik	194.732.908	217.829.117	(23.096.209)	(10,60)
Beban Barang Non Oprrsasional Penanganan Covid-19	2.000.000	0	2.000.000	0
Beban Langganan Telepon	9.537.070	10.567.318	(1.030.248)	9,74
Beban Langganan Air	448.500	254.270	194.230	76,38
Beban Sewa	155.520.000	189.540.000	(34.020.000)	(17,94)
Total Beban Barang dan Jasa	971.623.666	962.180.692	9.442.974	0,98

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan : Rp275.672.675

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 275.672.675 dan Rp. 229.051.643. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 40 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	183.260.059	133.885.600	49.374.459	36,87
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	84.223.866	67.676.643	16.547.223	24,45
Beban Pemeliharaan Jaringan	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	3.982.000	20.300.000	(16.318.000)	(80,38)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	4.206.750	7.189.400	(2.982.650)	(41,48)
Total Beban Pemeliharaan	275.672.675	229.051.643	46.621.032	20,35

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas :
Rp17.651.300*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 17.651.300 dan Rp. 11.213.600. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 41 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	13.581.300	10.333.600	(36.876.200)	(78,11)
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	4.070.000	880.000	(6.270.000)	(87,69)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	17.651.300	11.213.600	6.437.700	57,41

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp. 0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 42 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial : Rp. 0

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 43 Rincian Beban Bantuan Sosial per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp1.357.465.465

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.357.465.465 dan Rp. 1.389.420.337. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan

Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 44 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	286.250.268	315.048.603	(28.798.335)	(9,14)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.071.215.197	1.073.746.734	(2.531.537)	(0,23)
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
Jumlah Penyusutan	1.357.465.465	1.388.795.337	(31.329.872)	(2,25)
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0	625.000	0	0
Beban Penyusutan Aset lain-lain	0	0	0	0
Jumlah Amortisasi				
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.357.465.465	1.389.420.337	(31.954.872)	(2,30)

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang tak
Tertagih : Rp. 0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 45 Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain
: Rp. 0*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 46 Rincian Beban Lain-lain
per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

*Beban Kegiatan Non
Operasional :
Rp20.234.912*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 47 Rincian Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Kantor				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	20.234.912	(20.234.912)	(100)
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	1.025.400	1.025.400	(100)
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	20.234.912	(20.234.912)	(100)

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp. 0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 48 Rincian Pos Luar Biasa
per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 301.263.725.441 dan Rp. 303.018.084.049.

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. (13.820.472.240) dan Rp. (11.113.160.069). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain
per 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
Jumlah	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 12.536.291.928 dan Rp. 10.248.392.270.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
per 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(4.692.750)
Ditagihkan ke Entitas Lain	12.509.557.678
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	31.427.000
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
Jumlah	12.536.291.928

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2021, DDEL sebesar Rp(4.692.750) sedangkan DKEL sebesar Rp12.509.557.678.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2021, sebesar Rp0 yang diterima sepanjang tahun 2021.

Rincian transfer masuk untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No	Pemberi Transfer Masuk	Bentuk Transfer Masuk	Nilai Transfer Masuk
1	-	-	-
2	-	-	-

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan hibah langsung yang diperoleh dari Hibah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) berupa barang sebesar Rp31.427.000, dengan nomor registrasi 222NP7UA.

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp299.979.545.129 dan Rp302.153.316.250.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan dan tindak lanjut temuan BPK dalam paoran keuangan semester I Tahun 2021.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak terdapat informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual di semester I Tahun 2021.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Makassar adalah :

1. MANDIRI KC. MAKASSAR KARTINI A/C 152-009603674-0 a.n. BPg 136 PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG (099422) yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp0.
2. PT. BANK RAKYAT INDONESIA A/C 0050-01001094-30-4 a.n. BPg 136 PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG (099423) yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp0.
3. Bank Tabungan Negara Cabang Makassar A/C 00372-01-30-000042-4 a.n. RPL 136 PN Makassar Utk PDT yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp15.017.381.107.

F.2.4. Revisi DIPA

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tidak terdapat revisi DIPA di semester I 2021

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak terdapat ralat SPM, SSBP dan SSPB pada semester 1 Tahun 2021

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Tidak ada catatan lainnya dalam laporan ini

LAPORAN PENDUKUNG

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Negeri Makassar
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi, dan Nilai Buku Aset Tetap
untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2021

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Total Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				S.D PERIODE INI	2021	Per 30 Juni 2021	Per 30 Juni 2021
A.	Peralatan dan Mesin		9.158.371.371	8.153.669.210	289.746.968	8.443.416.178	714.955.193
1	Alat Bantu	7	1.598.486.077	1.381.508.066	108.489.006	1.489.997.072	108.489.005
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	941.965.092	941.965.092	0	941.965.092	0
3	Alat Kantor	5	969.529.804	834.726.804	28.933.400	863.660.204	105.869.600
4	Alat Rumah Tangga	5	2.736.929.193	2.498.468.984	54.520.892	2.552.989.813	183.939.380
5	Alat Studio	5	343.738.205	322.335.965	6.818.320	329.154.285	14.583.920
6	Alat Komunikasi	5	85.814.300	65.152.010	6.887.430	72.039.440	13.774.860
7	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15	-	-	-	-	-
8	Komputer Unit	4	1.945.573.745	1.666.490.351	60.690.936	1.727.181.287	218.392.458
9	Peralatan Komputer	4	534.534.955	441.221.938	23.407.047	464.628.985	69.905.970
10	Peralatan Olah Raga	3	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	0
B.	Gedung dan Bangunan		58.643.557.800	7.326.820.535	1.071.215.197	8.398.035.732	50.245.522.068
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	55.510.420.800	6.647.785.609	974.210.209	7.621.995.818	47.888.424.982
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	3.133.137.000	679.034.926	97.004.988	776.039.914	2.357.097.086
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		-	-	-	-	-

D.	Aset Tetap Lainnya		1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	-	-	-	-	-	-
2	Kartografi, Naskah Dan Lukisan	-	-	-	-	-	-
3	Barang Bercorak Kesenian	4	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
4	Tanda Penghargaan Bidang Olah Raga	-	-	-	-	-	-
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan		-	-	-	-	-
1	Alat Kantor	5	-	-	-	-	-
2	Alat Rumah Tangga	5	-	-	-	-	-
3	Alat Studio	5	-	-	-	-	-
4	Alat Komunikasi	5	-	-	-	-	-
5	Alat Kedokteran	5	-	-	-	-	-
6	Komputer Unit	4	-	-	-	-	-
7	Peralatan Komputer	4	-	-	-	-	-
8	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	-	-	-	-	-
9	Bahan Perpustakaan Tercetak	-	-	-	-	-	-
1	Tanda Penghargaan Bidang Olah Raga	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		67.803.429.171	15.481.989.745	1.360.962.165	16.842.951.910	50.960.477.261
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya		67.803.429.171	15.481.989.745	1.360.962.165	16.842.951.910	50.960.477.261

Pengadilan Negeri Makassar
Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa
untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2021

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
		U					
1	PT. Bank Tabungan Negara (Persero)	Barang	-	31.427.000	31.427.000	-	-
			Jumlah :	31.427.000	31.427.000	-	-

Halaman ini bukan bagian dari laporan keuangan.

Silahkan ganti halaman ini dengan laporan realisasi belanja akrual (dari menu neraca akrual aplikasi komdanas)



Catatan atas Laporan
Keuangan

005
01
1900
099422

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI TAHUN 2021